Gubernur Propinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 29 TAHUN 2004

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN USAHA PERPASARAN SWASTA DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 25 Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 44 Tahun 2003 tanggal 6 Juni 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perpasaran Swasta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu ditetapkan Tata cara permohonan izin penyelenggaraan usaha Perpasaran swasta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Gubernur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN USAHA PERPASARAN SWASTA DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Tim Pertimbangan Perpasaran Swasta yang selanjutnya disebut Tim Pertimbangan adalah Tim Pertimbangan Perpasaran Swasta Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Perpasaran Swasta adalah kegiatan penyelenggaraan usaha dan penyediaan sarana/tempat usaha yang dilakukan oleh pihak swasta.

BAB II

IZIN PENYELENGGARAAN USAHA PERPASARAN SWASTA

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha perpasaran swasta harus mendapat izin dari :
 - a. Gubernur apabila luas efektif lantai usaha diatas 2.000 M²
 - b. Wakil Gubernur apabila luas efektif lantai usaha 201 M² s.d 2.000 M²
 - c. Walikota/madya apabila luas efektif lantai usaha s/d 200 M²
- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur/Wakil Gubernur/Walikota/madya melalui Tim Pertimbangan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotokopi KTP pemohon.
 - b. Fotokopi Akte pendirian perusahaan.
 - c. Fotokopi NPWP.
 - d. Fotokopi ketetapan rencana kota dan rencana tata letak bangunan.
 - e. Fotokopi Surat Tanah (Sertifikat/Akte Jual Beli/Fatwa).
 - f. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan fotokopi Izin Penggunaan Bangunan (IPB).
 - g. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa (apabila menyewa bangunan).
 - h. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan (UUG).
 - i. Fotokopi hasil kajian Analisa Dampak Lalu Lintas (Andal) khusus untuk penyelenggaraan usaha perpasaran swasta yang luasnya diatas 2.000 M² dan lokasinya terletak disisi jalan kolektor/arteri.
 - j. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - k. Gambar Lay Out kegiatan usaha perpasaran swasta.

Pasal 3

Prosedur pengajuan permohonan izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta adalah sebagai berikut :

a. Pemohon

Membuat surat permohonan secara tertulis dan menyampaikan berkas permohonan kepada Gubernur/Wakil Gubernur/Walikota/mayor.

b. Tim Pertimbangan

Gubernur/Wakil Gubernur/Walikota/mayor menyampaikan permohonan kepada Tim Pertimbangan Perpasaran Swasta dengan tugas sebagai berikut :

1. Menerima dan meneliti berkas permohonan secara administratif.
2. Melakukan pengkajian secara koordinatif bersama unit-unit terkait.
3. Melakukan peninjauan lapangan.
4. Membuat berita acara peninjauan lapangan.
5. Membuat laporan hasil kajian dan hasil peninjauan ke lapangan kepada Gubernur/Wakil Gubernur/Walikota/mayor dan menyampaikan tembusannya kepada instansi terkait.
6. Membuat dan menyampaikan konsep persetujuan atau penolakan izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta untuk ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Walikota/mayor.
7. Menyampaikan surat persetujuan atau surat penolakan izin usaha penyelenggaraan perpasaran swasta kepada pemohon.

Pasal 4

Jangka waktu pengurusan izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta selambat-lambatnya 20 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 5

Bagan Tata Cara permohonan izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

BAB III

DAFTAR ULANG IZIN PENYELENGGARAAN USAHA
PERPASARAN SWASTA

Pasal 6

Izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta berlaku selama kegiatan usaha tersebut masih beroperasi dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun sekali kepada Gubernur/Wakil Gubernur/Walikota/mayor melalui Tim pertimbangan perpasaran swasta.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Maret 2004

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

H. RITOLA TASMAYA
NIP 140091657

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2004 NOMOR 27

Lampiran : Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor :
Tanggal :

BAGAN PROSEDUR DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN
USAHA PERPASARAN SWASTA DI PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

No.	Kegiatan	Pemohon	Tim Pertimbangan	Gubernur/ Wakil Gubernur /Walikotamadya
1.	Membuat surat Permohonan di sampaikan kepada Gubernur/Wakil Gub. Walikotamadya			
2.	Menerima dan meneliti berkas permohonan secara administratif			
3.	Melakukan pengkajian secara koordinatif dengan unit-unit terkait dan membuat serta menyampaikan laporan hasil kajian dan hasil peninjauan lapangan kepada Gubernur/Wakil Gubernur/Walikotamadya			
4.	Menerima, dan memberikan arahan/ petunjuk			
5.	Memproses tindak lanjut arahan/petunjuk Gubernur/Wakil Gubernur/Walikotamadya dan membuat serta menyampaikan konsep persetujuan dan atau penolakan izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta kepada Gubernur/Wakil Gubernur/Walikotamadya untuk ditandatangani			
6.	Menerima, dan menandatangani persetujuan/penolakan			
7.	Menyampaikan surat persetujuan atau penolakan izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta kepada pemohon			
8.	Menerima surat persetujuan atau Penolakan.			

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SUTIYOSO